

## Kajian Terhadap Aspek Geospasial Kabupaten dan Kota yang Bercirikan Kepulauan di Indonesia

*Study of the Geospatial Aspects of Regencies and Cities Characterized as Archipelagic in Indonesia*

Debi Nadia Putri\*<sup>1</sup>, I Made Andi Arsana<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Magister Teknik Geomatika, Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik, Kampus UGM, Indonesia

<sup>2</sup> Departemen Teknik Geodesi FT UGM

\*Korespondensi penulis: debyshizhi@gmail.com

Diterima: 17052022; Diperbaiki: 02082022; Disetujui: 31012023; Dipublikasi: 28022023

**Abstrak:** Indonesia adalah salah satu negara kepulauan (*archipelagic state*) yang memiliki kondisi geografis sangat strategis. Luas wilayah perairan Indonesia terbagi menjadi perairan kepulauan dan perairan pedalaman yang, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Secara keseluruhan, Indonesia memiliki total wilayah laut seluas 3.223.137 km<sup>2</sup> dan luas daratan sebesar 1.890.739 km<sup>2</sup>. Jumlah pulau yang ada di Indonesia dan sudah terverifikasi pada tahun 2017 tercatat sebanyak 16.056 pulau. Pulau-pulau dan ruang laut tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak luput dari pengelolaan dan tanggung jawab pemerintah Indonesia. Meskipun demikian, jumlah dan posisi pulau serta jarak antar pulau seringkali menjadi kendala dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak meratanya pembangunan yang ada di Indonesia khususnya pada daerah pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar. Hal ini memerlukan perhatian dan langkah khusus agar isu ketidakmerataan pembangunan bisa diatasi, salah satunya dengan memberi kewenangan kepada pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan wilayahnya. Pada prosesnya, daerah yang memiliki wilayah laut luas dengan banyak pulau tentunya berbeda dengan daerah yang tidak memiliki wilayah laut dan pulau-pulau. Karena kompleksitasnya, perlu dilakukan pengelolaan khusus untuk daerah yang memiliki laut dan pulau-pulau yang diistilahkan dengan “Bercirikan Kepulauan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi daerah kabupaten kota yang bercirikan kepulauan di Indonesia berdasarkan aspek geospasial. Analisis dilakukan menggunakan analisis SIG (sistem informasi geografis) dalam mengkaji bentuk geografis dari kabupaten kota yang bercirikan kepulauan dengan luas wilayah laut lebih luas dari wilayah daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau. Analisis dilakukan mulai dari 1) menentukan batas daerah laut 2) menghitung luas wilayah laut dan daratan 3) menghitung jumlah pulau dan gugusan pulau yang ada di setiap kabupaten kota. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu kabupaten kota yang memenuhi syarat secara geospasial sebagai daerah kepulauan yaitu sebanyak 66 kabupaten kota. Daerah kabupaten kota yang bercirikan kepulauan diantaranya 16 daerah administrasi kota dan 50 daerah lainnya administrasi kabupaten.

*Copyright © 2023 Geoid. All rights reserved.*

**Abstract:** Indonesia is an archipelagic country with a strategic geographical situation. Indonesia encompasses maritime zones such as archipelagic waters and internal waters which have an area of 3,092,085 km<sup>2</sup>. Indonesia's territorial sea has an area of 282,583 km<sup>2</sup>, the exclusive economic zone covers an area of 2,936,345 km<sup>2</sup> and the continental shelf area of Indonesia is 2,749,001 km<sup>2</sup>. Thus, Indonesia has a total maritime area of 3,223,137 km<sup>2</sup> and a land area of 1,890,739 km<sup>2</sup>. The number of islands in Indonesia which has been verified in 2017 is 16,056 islands. The islands and maritime space are integral parts of the management and responsibility of the Indonesian government. However, the number and position of islands and the distance between them often become obstacles in development, causing uneven development in Indonesia, especially in the small islands and outermost islands. This requires special attention and steps so that the issue of development inequality can be overcome, one of which is by giving local governments the authority to manage. In the management process, an area that has a large maritime area with many islands is certainly different from an area that does not have maritime area and islands. Due to its complexity, it is necessary to carry out special management for areas that have seas and islands which are termed “archipelagic characteristics”. This study aims to identify regencies/cities with archipelagic characteristics based on their geospatial aspects. The analysis carried out in this study uses GIS analysis (geographic information system) in assessing the geographical form of regencies/cities characterized by islands with a wider sea area of land area in which there are islands that form a cluster of islands. The analysis is carried out by 1) determining the boundaries of the sea area 2) calculating the area of the sea and land 3) calculating the number of islands and island groups in each district/city. The results show that there are 66 districts/cities that meet geospatial requirements as region with archipelagic characteristics in Indonesia. The city district areas characterized by islands include 16 city administrative areas and 50 other administrative districts.

---

Kata kunci: bercirikan kepulauan, gugusan pulau, UU No 32/2014, batas daerah laut

---

Cara untuk sitasi: Putri, D. N., & Arsana, I. M. A (2023). Kajian Terhadap Aspek Geospasial Kabupaten/Kota yang Bercirikan Kepulauan di Indonesia. *Geoid*, 18(2), 253-264.

---

## Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan (*archipelagic state*) yang memiliki kondisi geografis sangat strategis. Pada Forum *United Nations Conferences on the Standardization of Geographical Names* (UNCSSGN) dan pertemuan *United Nations Group of Experts on Geographical Names* (UNGEGN) yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat pada tanggal 7-18 Agustus 2017, Indonesia melaporkan sebanyak 16.056 pulau yang telah mempunyai nama dan koordinat (BIG, 2017). Pulau-pulau yang dimiliki Indonesia dapat menjadi suatu gugusan pulau yang memiliki kesatuan geografis dan wilayah laut yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan UU No 6/1996, wilayah perairan Indonesia terbagi menjadi perairan kepulauan dan perairan pedalaman yang memiliki luas 3.092.085 km<sup>2</sup>, laut teritorial memiliki luas 282.583 km<sup>2</sup>, untuk zona ekonomi eksklusif seluas 2.936.345 km<sup>2</sup> dan luas landas kontinen Indonesia yaitu 2.749.001 km<sup>2</sup>. Dengan demikian Indonesia memiliki total wilayah laut seluas 3.223.137 km<sup>2</sup> dan luas daratan sebesar 1.890.739 km<sup>2</sup> (BIG, 2017). Pulau-pulau dan ruang laut tersebut merupakan suatu kesatuan dan tidak luput dari pengelolaan dan tanggung jawab pemerintah Indonesia. Meskipun demikian, jumlah, posisi pulau dan jarak antar pulau seringkali menjadi kendala dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak meratanya pembangunan yang ada di Indonesia khususnya pada daerah pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar.

Koordinator Nasional *Destructive Fishing Watch* (DFW) menyampaikan bahwa pembangunan fisik di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar masih belum layak. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti keterbatasan infrastruktur dan tingginya tingkat kemiskinan yang ada pada daerah tersebut (Ambari, 2017). Adanya kesenjangan pembangunan yang terjadi di Indonesia dapat diatasi dengan adanya otonomi daerah yang dituangkan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah. Pada undang-undang tersebut dinyatakan “otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat” (UU No 23/2014). Dalam melaksanakan otonomi, daerah yang memiliki laut dengan daerah yang tidak memiliki laut tentu dikelola dengan cara yang berbeda. UU No 23/2014 pasal 14 ayat 5 dan 6 menyatakan bahwa “daerah kabupaten kota yang memiliki hasil laut mendapatkan pembagian hasil laut yang berada dalam batas wilayah 4 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah perairan kepulauan”. Indonesia memiliki 514 kabupaten kota dan 329 kabupaten kota diantaranya memiliki wilayah laut. Seharusnya wilayah laut tersebut dapat dimanfaatkan dan pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya dilakukan oleh kabupaten kota itu sendiri. Jika lautan dan sumberdaya alam yang dimiliki kabupaten kota dapat dikelola oleh pemerintah kabupaten kota tersebut, maka hasil yang didapat dari sumberdaya alam tersebut bisa diambil oleh pihak kabupaten kota yang bisa dijadikan salah satu faktor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat berkontribusi positif kepada postur APBD Pemerintah Daerah.

Selain PAD, sumberdaya yang diperlukan oleh daerah juga berasal dari pemerintah pusat, salah satunya dalam wujud Dana Alokasi Umum (DAU). Penetapan DAU dilakukan dengan salah satunya memperhitungkan luas wilayah laut yang dimiliki oleh kabupaten/kota yang berwenang untuk mengelola laut tersebut. Kabupaten/kota yang memiliki ruang darat serta laut tersebut dikenal dengan istilah “Bercirikan Kepulauan”. Perlu perhatian khusus terhadap kabupaten kota yang bercirikan kepulauan ini karena perhitungan luas wilayahnya harus melibatkan darat dan laut sekaligus. Sebelum bisa menghitung luas wilayah, langkah pertama adalah menetapkan kabupaten kota yang bercirikan kepulauan tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian terhadap kabupaten kota yang bercirikan kepulauan untuk mengatur urusan kelautan yang ada di wilayah administrasi kabupaten kota tersebut. Perlu dipahami adanya perbedaan yang signifikan daerah yang bercirikan kepulauan dibandingkan daerah yang tidak bercirikan kepulauan dalam pengelolaan pemerintahan. Daerah yang bercirikan kepulauan memiliki wilayah laut yang lebih luas dibandingkan daratan dan memiliki pulau-pulau yang tersebar sehingga membentuk gugusan pulau-pulau. Kompleksitas ini memerlukan perlakuan khusus.

Daerah kepulauan dapat diartikan sebagai suatu gugusan pulau yang terdiri dari bagian-bagian pulau dan perairan yang terdapat di antara pulau-pulau tersebut serta wujud alamiah lainnya yang terdapat didalamnya (UU No 32/2014). Oleh karena itu, daerah kepulauan adalah daerah yang memiliki wilayah laut lebih luas dibandingkan daratannya dan memiliki gugusan pulau. Maka kajian terhadap kabupaten kota yang bercirikan kepulauan dilakukan dengan memperhitungkan luas daerah lautan dan daratan yang dimiliki setiap kabupaten kota dan menentukan gugusan pulau yang terbentuk dari kumpulan pulau-pulau yang ada dalam daerah administrasi kabupaten kota. Kajian terhadap daerah bercirikan kepulauan pernah dilakukan pada tahun 2013, dengan penentuan daerah kabupaten kota bercirikan kepulauan dilakukan dengan menghitung jumlah kabupaten kota yang memiliki wilayah laut (Saksono, 2013). Selanjutnya pada tahun 2014, dilakukan analisis terhadap pengujian karakteristik fisik geografis gugusan pulau dan uji geometris luas wilayah laut dan daratan yang dimiliki setiap provinsi (Hidayat & Sutisna, 2014). Analisis daerah kabupaten kota bercirikan kepulauan dapat dilakukan dengan melakukan perhitungan terhadap luas wilayah laut dan daratan, serta menganalisis adanya gugusan pulau yang dimiliki oleh setiap kabupaten kota.

### Data dan Metode

Penelitian ini dilakukan terhadap 329 kabupaten dan kota yang memiliki garis pantai di Indonesia. Data yang digunakan yaitu data batas administrasi kabupaten dan kota (*shp*), garis pantai kabupaten dan kota (*shp*) dan pulau-pulau yang ada di Indonesia (*shp*). Penelitian ini menggunakan UU No 23/2014 sebagai dasar prinsip penentuan kabupaten dan kota bercirikan kepulauan dengan implementasi pasal 14 ayat 6&7 yang mana daerah kabupaten dan kota memiliki batas wilayah 4 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah perairan kepulauan dan jika jarak kurang dari 4 mil laut, maka batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari Daerah yang berbatasan. Parameter yang digunakan untuk melakukan analisis yaitu gugusan pulau dan luas wilayah laut yang dimiliki oleh setiap kabupaten dan kota.

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Pengumpulan data

Tahapan awal dari penelitian ini adalah melakukan pengumpulan data. Data yang diperoleh bersumberkan dari Instansi Badan Informasi Geospasial (BIG). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data batas administrasi kabupaten kota yang memiliki garis pantai di Indonesia dalam format *shapefile* sebanyak 329 kabupaten kota, data sebaran pulau-pulau di Indonesia yang masuk dalam wilayah administrasi kabupaten kota berupa *shapefile*, dan data garis pantai/garis pangkal kabupaten kota dengan format *shapefile*. Pada tahapan ini peneliti juga melakukan pengecekan dan persiapan terhadap perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan untuk menunjang penelitian.

2. Identifikasi pulau-pulau yang ada di setiap kabupaten dan kota

Identifikasi pulau-pulau merupakan proses perhitungan pulau-pulau yang berada dalam wilayah administrasi setiap kabupaten dan kota. proses identifikasi dilakukan dengan menggunakan *Software Arcgis*.

3. Penentuan batas daerah laut setiap kabupaten dan kota

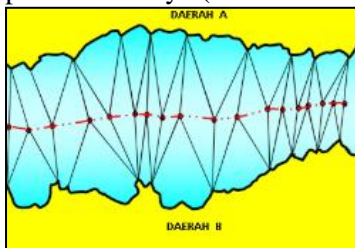
Sesuai dengan UU No 23/2014 Pasal 14 bahwa daerah kabupaten kota memiliki wilayah laut sejauh 4 mil laut yang diukur dari garis pantai. Dalam menentukan batas daerah laut, ada beberapa kondisi yang perlu diperhatikan. Setiap kondisi yang ada pada perbatasan daerah laut memiliki penyelesaian yang berbeda-beda. Pada penentuan batas daerah laut kabupaten kota, terdapat beberapa kondisi yang ditemui seperti daerah kabupaten kota yang berhadapan dengan laut lepas/perairan kepulauan, daerah kabupaten kota yang berdampingan, daerah kabupaten kota yang berhadapan dengan daerah lain dengan jarak laut diantara keduanya kurang dari 8 mil laut atau kurang dari 2 kali 4 mil laut, dan daerah yang kabupaten kota yang merupakan kumpulan pulau-pulau atau gugusan pulau.

Berdasarkan kondisi tersebut, sesuai dengan Permendagri No 141/2017 tentang pelaksanaan teknis dalam penentuan batas daerah laut maka penentuan daerah laut dapat dilakukan seperti berikut ini:

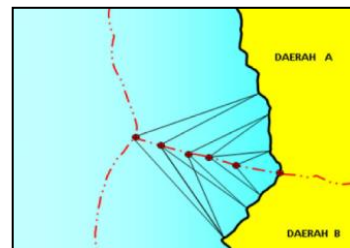
- Pada saat kondisi pantai yang berhadapan dengan laut lepas atau perairan kepulauan yang lebih dari 4 mil laut dari garis pantai, maka batas dapat diukur langsung sejauh 4 mil laut dari garis pantai untuk wilayah laut.
- Pada kondisi pantai yang saling berhadapan dilakukan dengan prinsip garis tengah (*median line*).

- Pada pantai yang saling berdampingan dilakukan dengan menggunakan prinsip garis sama jarak (*equidistant line*).
- Untuk pengukuran batas daerah laut pada suatu pulau yang berjarak lebih dari 2 kali 4 mil laut atau lebih dari 8 mil laut, maka diukur secara melingkar dengan jarak 4 mil laut untuk untuk daerah kabupaten kota.
- Pada kondisi suatu pulau yang berjarak kurang dari 2 kali 4 mil atau kurang dari 8 mil laut berada dalam suatu daerah kabupaten, maka diukur melingkar dengan jarak 4 mil laut untuk daerah Kabupaten Kota.
- Untuk pengukuran batas daerah laut pada suatu gugusan pulau-pulau yang berada pada satu kabupaten, diukur secara melingkar dengan jarak 4 mil laut untuk kewenangan batas laut Kabupaten Kota.

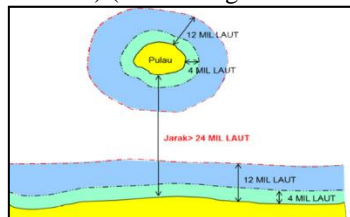
Penentuan gugusan pulau yang dimiliki setiap kabupaten kota ditentukan berdasarkan aspek spasial yang mana gugusan pulau merupakan rangkaian atau kumpulan pulau-pulau yang memiliki suatu kesatuan dan perairan yang terdapat di antara pulau-pulau tersebut serta wujud alamiah lainnya yang terdapat di dalamnya (UU N0 32/2014).



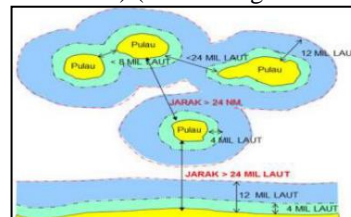
Gambar 1. Penarikan Batas Prinsip Garis Tengah (*Median Line*) (Permendagri No 141/2017)



Gambar 2. Penarikan Batas Prinsip Sama Jarak (*Equidistant Line*) (Permendagri No 141/2017)



Gambar 3. Penarikan Garis Batas Pada Pulau yang Berjarak Lebih Dari 2 Kali 4 Mil Laut (Permendagri No 141/2017)



Gambar 4. Penarikan Garis Batas Gugusan Pulau-pulau (Permendagri No 141/2017)

4. Identifikasi gugusan pulau yang dimiliki setiap kabupaten dan kota  
Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 34/2002 tentang Pedoman Umum Tata Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, gugusan pulau merupakan sekumpulan pulau-pulau yang secara geografis saling berdekatan, dimana ada keterkaitan erat dan memiliki ketergantungan/interaksi antar ekosistem, kondisi ekonomi, sosial budaya, baik secara individu maupun secara kelompok. Dalam hal ini identifikasi terhadap gugusan pulau hanya dilihat dari aspek geografis. Gugusan pulau hanya memperhitungkan posisi pulau, yang mana sebagai gugusan pulau secara geografis saling berdekatan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya yang memiliki keterkaitan erat dan ketergantungan/interaksi antar ekosistem di dalamnya.
5. Uji karakteristik daerah kabupaten dan kota yang bercirikan kepulauan  
Kabupaten dan kota yang bercirikan kepulauan tentunya harus memenuhi aspek geospasial yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini aspek geospasial yang digunakan untuk penentuan penentuan kabupaten dan kota yang bercirikan kepulauan yaitu:
  1. Wilayah Kabupaten/Kota memiliki wilayah laut yang luasnya lebih luas dari luas daratan yang ada di Kabupaten Kota tersebut.
  2. Wilayah kabupaten kota memiliki pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau.

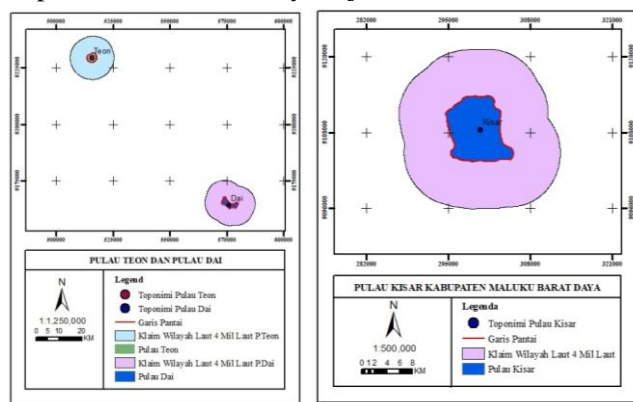
**Hasil dan Pembahasan**

**1. Batas wilayah laut kabupaten kota**

Berdasarkan UU No 23/2014 dalam penentuan batas daerah laut, ada beberapa kondisi yang perlu diperhatikan. Adapun pada penerapan dalam penentuan batas daerah laut kabupaten kota dijumpai beberapa kondisi seperti berikut:

*a) Daerah dengan pantai yang berhadapan dengan laut lepas*

Daerah yang memiliki pantai yang berhadapan dengan laut lepas dapat mengklaim batas lautnya sejauh 4 mil laut ke arah laut lepas ditarik dari garis pantai. Secara keseluruhan daerah yang dimiliki oleh setiap kabupaten kota tidak ada yang berbatasan dengan laut lepas. Akan tetapi ada beberapa pulau dalam kabupaten kota yang berbatasan dengan laut lepas dan dapat ditarik batas lautnya sejauh 4 mil laut.

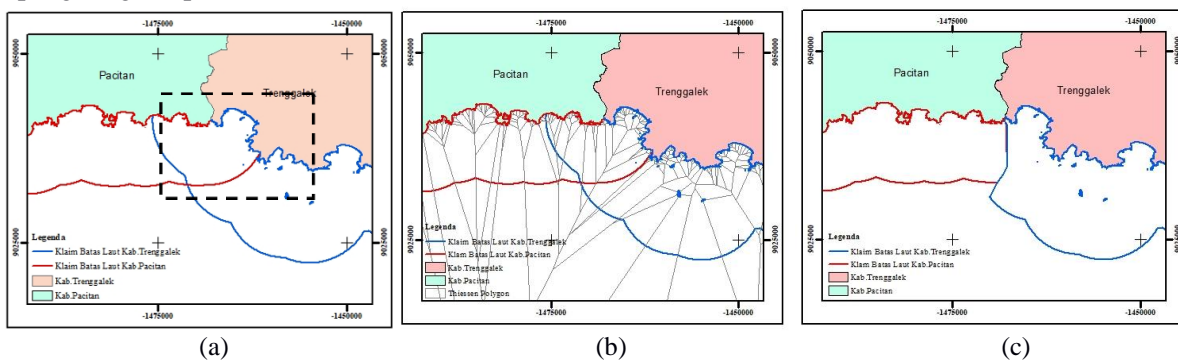


Gambar 5. Pulau yang memiliki laut sejauh 4 mil laut

Pada Gambar 5, terdapat beberapa pulau yang berhadapan dengan laut dan dapat mengklaim batas daerah laut sejauh 4 mil laut di antaranya Pulau Teon di Kabupaten Maluku Tengah dan Pulau Dai serta Pulau Kisar yang berada di Kabupaten Maluku Barat Daya. Selain ketiga pulau tersebut ada beberapa pulau-pulau yang dapat mengklaim batas lautnya sejauh 4 mil laut seperti Pulau Ronto di Kota Sabang, Pulau Simuk di Nias Selatan, Pulau Mega di Bengkulu Utara, Pulau Sabira di Kepulauan Seribu, dan beberapa pulau di Bintan (Pulau Dundum, Pulau Jengkulan, dan Pulau Tukongkemudi), serta pulau pulau lainnya yang terdapat di berbagai bagain kabupaten/kota lainnya. Setiap pulau berhak mengklaim batas daerah laut paling jauh 4 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut. Pulau-pulau kecil yang dapat mengklaim batas daerah laut sejauh 4 mil laut sangat berpengaruh terhadap luas wilayah laut yang akan didapatkan oleh setiap kabupaten/kota.

*b) Daerah dengan pantai yang berdampingan dengan daerah lain*

Batas daerah kabupaten/kota yang berdampingan dilakukan dengan prinsip sama jarak (*equidistant line*). Prinsip sama jarak merupakan sebuah garis yang terdiri dari titik-titik dengan jarak yang sama dari titik terdekat dengan garis pangkal/garis pantai.

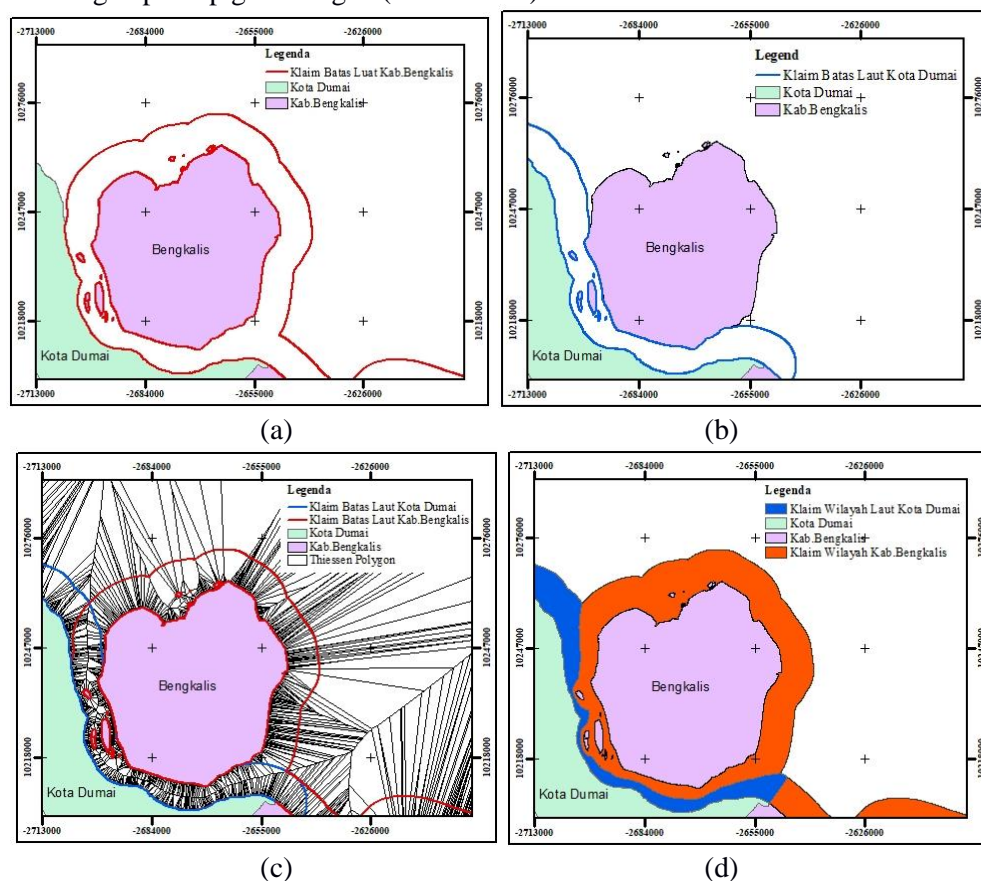


Gambar 6. (a) klaim batas laut Kab.Pacitan dan Kab.Trenggalek yang tumpang tindih, (b) Thiessen Polygon, (c) Batas laut Kab.Pacitan dan Kab.Trenggalek.

Pada Gambar 6 dapat dilihat bahwa Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek memiliki kondisi geografis yang berdampingan. Jika dilakukan klaim batas wilayah laut sejauh 4 mil laut, maka akan ada daerah yang tumpang tindih di antara keduanya. Daerah yang tumpang tindih dari hasil klaim 4 mil laut oleh kedua belah pihak dapat dilihat pada Gambar 6(a). pada Gambar 6(a) garis yang berwarna merah merupakan klaim batas laut dari Kabupaten Pacitan dan garis berwarna biru merupakan klaim batas daerah laut dari Kabupaten Trenggalek. Karena adanya daerah yang tumpang tindih, maka dari itu untuk penentuan batas laut dilakukan dengan menggunakan prinsip sama jarak dengan pembuatan *thiessen polygon* seperti yang dapat dilihat pada Gambar 6(b). Garis-garis yang dihasilkan oleh *thiessen polygon* digunakan untuk membagi area di antara titik-titik yang telah dibuat menjadi sama jarak. Penarikan garis batas dapat dilakukan mengikuti garis-garis yang dihasilkan oleh *thiessen polygon*. pada Gambar 6(c) dapat dilihat hasil dari penarikan menggunakan prinsip sama jarak dengan metode *thiessen polygon*. Gambar 6 hanya menampilkan salah satu bentuk daerah kabupaten kota yang berdampingan di Indonesia. Pada daerah kabupaten kota lainnya yang berdampingan, untuk penentuan batas daerah lautnya sama dengan penentuan batas laut Kabupaten Pacitan dengan Kabupaten Trenggalek. Daerah kabupaten kota yang memiliki wilayah laut di Indonesia, hampir semuanya memiliki kondisi geografis yang berdampingan dengan daerah lain. Hal ini terjadi terutama pada daerah kabupaten kota yang terletak di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Papua dan pada pulau-pulau lainnya.

c) Daerah dengan pantai yang saling berhadapan

Daerah kabupaten kota yang memiliki pantai berhadapan dengan daerah kabupaten kota lain atau batas laut antara kedua daerah kurang dari 8 mil laut tidak dapat mengklaim ruang laut sejauh 4 mil laut. Penentuan batas daerah laut dilakukan dengan prinsip garis tengah (*median line*).



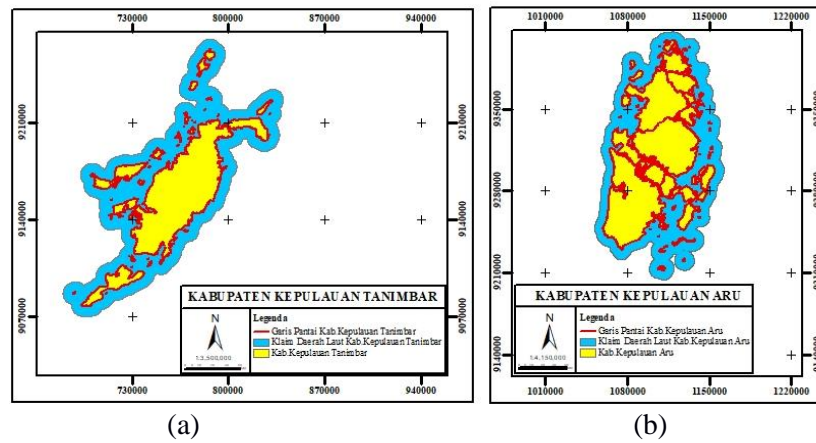
Gambar 7. (a) Klaim Batas Laut Kab.Bengkalis, (b) Klaim Batas Laut Kota Dumai, (c) *Thiessen Polygon*, (d) Batas Daerah Laut Kab.Bengkalis dan Kota Dumai

Gambar 7 memperlihatkan kondisi geografis dari Kabupaten Bengkalis dengan Kota Dumai yang saling berhadapan dengan jarak daerah laut di antaranya yang kurang dari 2 kali 4 mil laut atau kurang dari 8 mil laut. Pada Gambar 7(a) dapat dilihat garis merah merupakan klaim batas wilayah laut dari Kabupaten Bengkalis.

Sedangkan garis berwarna biru pada Gambar 7(b) merupakan klaim batas wilayah laut dari Kota Dumai. Karena adanya daerah yang tumpang tindih, maka batas daerah laut untuk daerah dengan kondisi yang berhadapan dapat dilakukan dengan prinsip garis tengah (*median line*). Secara metode dalam penentuan batas, prinsip garis tengah dan prinsip sama jarak dapat dilakukan dengan metode *thiessen polygon*. pada kondisi perbatasan antara Kabupaten Bengkalis dengan Kota Dumai terdapat beberapa pulau yang masuk dalam administrasi Kabupaten Bengkalis yang pada penentuan batas laut di antara kedua daerah tersebut harus dipertimbangkan (Gambar 7c). hasil dari penarikan garis batas antara Kabupaten Bengkalis dengan Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar 7(d). daerah yang berwarna biru merupakan daerah laut dari Kota Dumai dan daerah yang berwarna merah merupakan daerah laut dari Kabupaten Bengkalis. Kondisi geografis daerah kabupaten yang berhadapan tidak hanya pada Kabupaten Bengkalis dengan Kota Dumai. Beberapa daerah lainnya seperti Kabupaten Siak-Kepulauan Meranti, Bangka Selatan-Ogan Komering Ilir, Bangkalan-Gresik, Kota Tarakan-Bulungan, dan lainnya. pada dasarnya daerah yang berhadapan merupakan daerah yang terletak pada pulau yang berbeda.

d) Daerah gugusan pulau

Batas wilayah laut daerah kabupaten kota yang memiliki gugusan pulau dapat ditarik sejauh 4 mil laut dengan terdapat pulau pulau di dalamnya.



Gambar 8. Daerah Kabupaten/kota gugusan pulau

Daerah kabupaten kota yang merupakan gugusan pulau dapat memiliki wilayah laut sejauh 4 mil laut dari masing-masing pulau yang dimiliki. Batas daerah laut ditentukan dari klaim daerah laut dari pulau terluar yang didapatkan. Gambar 8(a) merupakan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Gambar 8(b) merupakan Kabupaten Kepulauan Aru yang merupakan gugusan pulau. Jumlah pulau yang dimiliki oleh Kepulauan Tanimbar yaitu sebanyak 536 pulau dengan luas wilayah laut 7.556,39 km<sup>2</sup>. Sedangkan Kepulauan Aru memiliki pulau sebanyak 1.152 Pulau dengan luas wilayah laut 8.194,96 km<sup>2</sup>. Selain Kepulauan Aru dan Kepulauan Tanimbar, masih ada beberapa kabupaten kota di Indonesia yang merupakan gugusan pulau seperti, Kota Batam, Banggai Kepulauan, Natuna, Kepulauan Anambas, Bintan, Lingga, dan lainnya.

2. Perhitungan Luas Wilayah Laut dan Daratan

Perhitungan luas daratan dan lautan dapat dilakukan setelah batas daerah laut ditentukan. Luas wilayah laut dan luas wilayah daratan dihitung untuk melihat selisih atau perbandingan antara luas wilayah laut dengan luas daratan yang dimiliki setiap kabupaten kota. Salah satu faktor untuk menentukan wilayah kabupaten kota yang bercirikan kepulauan yaitu dengan luas wilayah laut lebih luas dari luas wilayah daratan. Hasil dari perhitungan antara luas wilayah laut dengan luas wilayah daratan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Luas wilayah Laut dan Daratan setiap kabupaten/kota

Provinsi	Nama Kab/kota	L. Daratan (KM)	L. Laut (KM)	Provinsi	Nama Kab/kota	L. Daratan (KM)	L. Laut (KM)	Provinsi	Nama Kab/kota	L. Daratan (KM)	L. Laut (KM)	Provinsi	Nama Kab/kota	L. Daratan (KM)	L. Laut (KM)
Aceh	Aceh Barat	2.824,66	365,66	Jawa Barat	Bekasi	1.251,73	309,62	Banten	Kota Cilegon	162,43	267,68	Sulawesi Barat	Majene	908,77	805,45
	Aceh Barat Daya	1.883,37	324,82		Cianjur	3.634,14	513,90		Kota Serang	26,68	27,54		Mamuju	4.984,40	3.298,01
	Aceh Besar	2.886,09	1.656,23		Cirebon	1.075,19	408,49		Tangerang	1.027,66	168,81		Mamuju Tengah	2.778,11	509,59
	Aceh Java	3.898,49	1.031,02		Garut	3.106,05	510,48		Lebak	3.311,02	544,26		Pasangkayu	2.906,47	993,91
	Aceh Selatan	4.175,22	1.287,97		Indramayu	2.079,45	1.226,01		Pandeglan	2.769,71	2.820,16		Polewali Mandar	2.074,08	438,12
	Aceh Singkil	1.852,14	2.710,28		Karawang	1.915,40	563,93		Serang	1.469,08	1.129,31	Sulawesi Selatan	Banteang	396,74	146,52
	Aceh Tamiang	2.183,35	357,67		Kota Cirebon	39,48	44,96	Bali	Badung	398,82	484,76		Baru	1.203,86	499,64





Luas wilayah laut dan daratan setiap kabupaten kota berbeda-beda tergantung dari bentuk geografis yang dimiliki. Indonesia memiliki sebanyak 514 kabupaten kota, diantaranya sebanyak 329 kabupaten kota terdapat di wilayah pesisir dan memiliki garis pantai. Kabupaten kota yang berada di wilayah pesisir pantai, terdapat 72 kabupaten kota yang memiliki wilayah laut lebih luas dari pada wilayah daratan. Jika dibandingkan dengan keseluruhan kabupaten kota yang ada di Indonesia, kabupaten kota yang memiliki wilayah laut lebih luas dibandingkan daratannya sebanyak 14%. Luas wilayah laut juga dipengaruhi oleh batas wilayah laut yang dimiliki oleh setiap kabupaten kota. Daerah kabupaten kota dengan daratan terluas dimiliki oleh Kabupaten Merauke dengan luas 45.791,94 km<sup>2</sup> dan daerah dengan dataran terkecil yaitu Kepulauan Seribu dengan luas 10,72 km<sup>2</sup>. Sedangkan untuk wilayah laut terluas dimiliki oleh Raja Ampat dengan luas 20.481,25 km<sup>2</sup> dan daerah laut terkecil dimiliki oleh Kota Samarinda dengan luas 0,95 km<sup>2</sup>.

### 3. Jumlah Pulau & Gugusan Pulau di Setiap Kabupaten Kota

Pulau-pulau yang dimiliki oleh kabupaten kota berdasarkan hasil analisis yang dilakukan berjumlah 19.059 pulau. Jumlah pulau tersebut berdasarkan pada data wilayah administrasi kabupaten kota yang didapat dari Instansi Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2021. Data ini berbeda dengan data pada tahun 2017, yang mana pada tahun 2017 jumlah pulau yang tercatat hanya 16.056 pulau. Dikarenakan pulau-pulau yang dimiliki oleh kabupaten kota berpengaruh terhadap luas daerah laut yang dapat diklaim, maka dari itu pada penelitian ini data yang digunakan adalah data terbaru tahun 2021. Data pulau yang dimiliki kabupaten kota dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2. Jumlah Pulau dan Gugusan Pulau

Provinsi	Nama Kab/kota	Jumlah Pulau	Gugusan Pulau	Provinsi	Nama Kab/kota	Jumlah Pulau	Gugusan Pulau	Provinsi	Nama Kab/kota	Jumlah Pulau	Gugusan Pulau	Provinsi	Nama Kab/kota	Jumlah Pulau	Gugusan Pulau																												
Aceh	Aceh Barat	0	0	Jawa Barat	Bekasi	0	0	Banten	Kota Cilegon	7	1	Sulawesi Barat	Majene	4	1																												
	Aceh Barat Daya	1	0		Cianjur	0	0		Kota Serang	0	0		Mamuju	65	3																												
	Aceh Besar	49	1		Cirebon	0	0		Tangerang	1	0		Mamuju Tengah	12	1																												
	Aceh Jaya	44	1		Garut	4	1		Lebak	43	1		Pasangkayu	1	0																												
	Aceh Selatan	7	1		Indramayu	3	1		Pandeglang	74	1		Polewali Mandar	10	1																												
	Aceh Singkil	70	1		Karawang	0	0		Serang	21	1		Sulawesi Selatan	Bantaeng	1	0																											
	Aceh Tamiang	2	1		Kota Cirebon	1	0		Bali	badung	3		0	Baru	6	1																											
	Aceh Timur	1	0		Pangandaran	7	1		Buleleng	4	1		Bone	6	1																												
	Aceh Utara	0	0		Subang	0	0		Gianjar	0	0		Bulukumba	3	1																												
	Bereuen	0	0		Sukabumi	24	1		Jembrana	3	1		Jeneponto	3	1																												
	Kota Banda Aceh	2	1		Tasikmalaya	4	1		Karangasem	7	1		Gowa	0	0																												
	Kota Langsa	5	1		Jawa Tengah	Batang	0		0	Klungkung	21		1	Kepulauan Selayar	102	7																											
	Provinsi	Nama Kab/kota	Jumlah Pulau		Gugusan Pulau	Provinsi	Nama Kab/kota		Jumlah Pulau	Gugusan Pulau	Provinsi		Nama Kab/kota	Jumlah Pulau	Gugusan Pulau	Provinsi	Nama Kab/kota	Jumlah Pulau	Gugusan Pulau																								
																				Kota Lhokseumawe	0	0	Brebes	0	0	Kota Denpasar	3	1	Kota Makassar	14	1												
Kota Sabang				5				1				Cilacap								21	1	Tabanan	1	0	Kota Palopo	3	1																
Nagan Raya				0				0				Demak								0	0	Maluku	Buru	4	1	Kota Pare Pare	0	0															
Pidie				0				0				Jepara								32	1	Buru Selatan	16	1	Luwu	0	0																
Pidie Jaya				0				0				Kebumen								5	1	Kepulauan Aru	1.152	1	Luwu Timur	10	1																
Simeulue				185				3				Kendal								0	0	Kepulauan Tanimbar	536	1	Luwu Utara	1	0																
Sumatera Barat				Agam				3				1								Kota Pekalongan	0	0	Kota Ambon	0	0	Maros	4	1															
Kepulauan Mentawai				286				4				Kota Semarang								1	0	Kota Tual	78	4	Pangkajene Kepulauan	191	10																
Kota Padang				20				1				Kota Tegal								0	0	Maluku Barat Daya	70	9	Pinrang	5	1																
Kota Pariaman				5				1				Pati								0	0	Maluku Tengah	54	5	Sinjai	10	1																
Padang Pariaman				1				0				Pekalongan								0	0	Maluku Tenggara	59	1	Takalar	48	1																
Pasaman Barat				12				1				Pemalang								0	0	Seram Bagian Barat	41	1	Wajo	3	1																
Pesisir Selatan				47				2				Purworejo								0	0	Seram Bagian Timur	85	2	Sulawesi Tengah	Banggai	82	1															
Sumatera Selatan	Banyuasin	7	1	Rembang	3	1	Maluku Utara	Almohera Barat	97	1	Banggai Kepulauan	266	1																														
Ogan Komering Ilir	1	0	Tegal	0	0	Almohera Selatan	526	3	Banggai Laut	1.056	2																																
Asahan	0	0	Wonogiri	0	0	Almohera Tengah	58	4	Boul	17	1																																
Sumatera Utara	Nama Kab/kota	Jumlah Pulau	Gugusan Pulau	Provinsi	Nama Kab/kota	Jumlah Pulau	Gugusan Pulau	Provinsi	Nama Kab/kota	Jumlah Pulau	Gugusan Pulau	Provinsi	Nama Kab/kota	Jumlah Pulau	Gugusan Pulau																												
																Batu Bara	2	1	Jawa Timur	Bangkalan	1	0	Almohera Timur	61	1	Donggala	17	1															
																Deli Serdang	1	0	Banyuwangi	16	1	Almohera Utara	99	1	Kota Palu	0	0																
																Kota Gunungsitoli	0	0	Blitar	30	1	Kepulauan Sula	33	1	Morowali	159	1																
																Kota Medan	0	0	Gresik	13	1	Kota Ternate	11	2	Morowali Utara	45	1																
																Kota Sibolga	2	0	Jember	80	1	Kota Tidore Kepulauan	13	1	Parigi Moutong	50	1																
																Labuhan Utara	2	1	Kota Pasuruan	0	0	Pulau Morotai	35	1	Poso	1	0																
																Labuhanbatu	0	0	Kota Probolinggo	0	0	Pulau Taliabu	77	1	Tojo Una Una	338	2																
																Langkat	12	1	Kota Surabaya	0	0	NTB	Bima	111	1	Toli Toli	47	1															
																Mandailing Natal	18	1	Lamongan	2	1	Dompur	24	1	Sulawesi Tenggara	Bombana	29	2															
																Nias	5	1	Lumajang	1	0	Kota Bima	0	0	Buton	18	2																
																Nias Barat	11	1	Malang	110	1	Kota Mataram	0	0	kota Bau Bau	13	1																
																Nias Selatan	90	2	Pacitan	34	1	Lombok Barat	118	1	Buton Selatan	0	0																
																Nias Utara	17	1	Pamekasan	0	0	Lombok Tengah	67	1	Buton Tengah	20	2																
Serdang Begadai	11	1	Pasuruan	0	0	Lombok Timur	36	1	Buton Utara	41	1																																
Tapanuli Selatan	0	0	Probolinggo	1	0	Lombok Utara	3	1	Kolaka	12	1																																
Tapanuli Tengah	59	1	Sampang	1	0	Sumbawa Barat	20	1	Kolaka Utara	10	1																																
Riau	Nama Kab/kota	Jumlah Pulau	Gugusan Pulau	Provinsi	Nama Kab/kota	Jumlah Pulau	Gugusan Pulau	Provinsi	Nama Kab/kota	Jumlah Pulau	Gugusan Pulau	Provinsi	Nama Kab/kota	Jumlah Pulau	Gugusan Pulau																												
																Bengkalis	24	2	Sidoarjo	1	0	Sumbawa	62	1	Konawe	3	1																
																Indragiri Hilir	16	1	Situbondo	0	0	NTT	Alor	32	1	Konawe Kepulauan	3	1															
																Kepulauan Meranti	12	1	Sumenep	119	7	Belu	0	0	Konawe Selatan	32	1																
																Kota Dumai	0	0	Trenggalek	92	1	Ende	15	1	Konawe Utara	34	1																
																Pelalawan	10	1	Tuban	0	0	Flores Timur	16	1	Kota Kendari	1	0																
																Rokan Hilir	13	2	Tulungagung	24	1	Kota Kupang	0	0	Muna	22	1																
																Siak	0	0	Bengkayang	12	1	Kupang	20	1	Muna Barat	43	1																
																Lampung	Nama Kab/kota	Jumlah Pulau	Gugusan Pulau	Provinsi	Nama Kab/kota	Jumlah Pulau	Gugusan Pulau	Provinsi	Nama Kab/kota	Jumlah Pulau	Gugusan Pulau	Provinsi	Nama Kab/kota	Jumlah Pulau	Gugusan Pulau												
																																Kota Bandar Lampung	3	1	Kayong Utara	96	4	Lembata	5	1	Wakatobi	134	2
																																Lampung Selatan	50	1	Ketapang	65	1	Malaka	0	0	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow	6

	Lampung Timur	3	1		Kota Singkawang	0	0		Manggarai	1	0		Bolaang Mongondow Selatan	5	1
	Pasewaran	64	1		Kubu Raya	29	1		Manggarai Barat	249	1		Bolaang mongondow Timur	10	1
	Pesisir Barat	10	1		Mempawah	4	1		Manggarai Timur	0	0		Bolaang Mongondow Utara	9	1
	Tanggamus	324	1		Sambas	0	0		Nagekeo	3	1		Kepulauan Sangihe	83	2
	Tulang Bawang	1	0	Kalsel	Banjarnegara	0	0		Ngada	29	1		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	26	3
Kepulauan Riau	Bintan	317	7		Barito Kuala	3	1		Rote Ndao	104	1		Kepulauan Talaud	25	3
	Karimun	297	1		Kota Baru	53	3		Sabu Raiiua	4	1		Kota Bitung	39	1
	Kepulauan Anambas	250	3		Tanah Bumbu	19	1		Sikka	17	1		Kota Manado	3	1
	Kota Batam	649	1		Tanah Laut	1	0		Sumba Barat	17	1		Minahasa	1	0
	Kota Tanjung Pinang	16	1	Kalteng	Kapuas	1	0		Sumba Barat Daya	4	1		Minahasa Selatan	4	1
	Lingga	1.031	6		Katingan	16	1		Sumba Tengah	29	1		Minahasa Tenggara	25	1
	Natuna	183	10		Kotawaringin Barat	1	0		Sumba Timur	81	1		Minahasa Utara	39	1
Bengkulu	Bengkulu Selatan	0	0		Kotawaringin Timur	7	1		Timor Tengah Selatan	0	0	Papua	Asmat	4	1
	Bengkulu Tengah	0	0		Pulau Pisau	0	0		Timor Tengah Utara	0	0		Biak Numfor	97	2
	Bengkulu Utara	8	1		Seruya	0	0	Papua Barat	Fak Fak	527	2		Jayapura	28	1
	Kaur	0	0		Sukamara	0	0		Kaimana	639	1		Kepulauan Yapen	155	1
	Kota Bengkulu	1	0	Kaltim	Berau	79	2		Kota Sorong	22	1		Kota Jayapura	16	1
	Muko-muko	0	0		Kota Balikpapan	4	1		Manokwari	10	1		Mamberamo Raya	11	1
	Seluma	0	0		Kota Bontang	25	1		Manokwari Selatan	1	0		Mappi	3	1
Bangka Belitung	Bangka	38	1		Kota Samarinda	0	0		Raja Ampat	2.955	9		Merauke	19	1
	Bangka Barat	68	1		Kutai Kartanegara	78	1		Sorong	135	1		Mimika	22	1
	Bangka Selatan	90	1		Kutai Timur	23	1		Sorong Selatan	1	0		Nabire	70	1
	Bangka Tengah	27	3		Paser	2	0		Tambrauw	5	1		Sarmi	15	2
	Belitung	173	2		Penajam Paser Utara	16	1		Teluk Bintuni	41	1		Supiori	124	2
	Belitung Timur	120	2	Gorontalo	Boalemo	25	1		Teluk Wondama	207	3		Waropen	4	1
	Kota Pangkal Pinang	0	0		Bone Bolango	0	0	Jambi	Tanjung Jabung Barat	0	0	Jakarta	Jakarta Utara	8	1
Kalimantan Utara	Bulungan	39	2		Gorontalo	0	0		Tanjung Jabung Timur	8	1		Kepulauan Seribu	115	1
	Kota Tarakan	3	1		Gorontalo Utara	56	1	Yogyakarta	Bantul	0	0				
	Nunukan	9	1		Kota Gorontalo	0	0		Gunung Kidul	33	1				
	Tana Tidung	26	1		Pahuwato	52	1		Kulon Progo	0	0		Jumlah Pulau		19.059

Sebanyak 329 kabupaten kota yang memiliki garis pantai, tidak semuanya mempunyai pulau. Ada sebanyak 73 kabupaten kota yang tidak memiliki pulau. Kabupaten yang memiliki pulau terbanyak yaitu Kabupaten Lingga dengan jumlah pulau 1.031 pulau, Kepulauan aru dengan jumlah pulau 1.152 pulau, Raja empat dengan 2.956 pulau, dan Banggai Laut dengan 1.056 pulau. Daerah kabupaten kota yang memiliki gugusan pulau ada sebanyak 203 kabupaten kota dengan rata-rata setiap kabupaten memiliki 1 gugusan pulau. Kabupaten kota yang memiliki gugusan pulau lebih dari 1 hanya 28 kabupaten/kota.

#### 4. Daerah Kabupaten/Kota yang Bercirikan Kepulauan

Daerah kabupaten kota yang dapat digolongkan sebagai daerah kepulauan adalah daerah yang memenuhi syarat secara geografis sebagai daerah kepulauan. Syarat yang perlu dipenuhi adalah memiliki lautan yang lebih luas dibandingkan dengan daratannya dan memiliki gugusan pulau di dalamnya (UU No 23/2014). Pada Tabel 3 berikut dapat dilihat bahwa daerah kabupaten kota mana sajakah yang memenuhi syarat sebagai daerah kepulauan.

Tabel 3. Kabupaten dan Kota yang memenuhi syarat sebagai daerah kepulauan

Nama Kab/kota	Lautan Lebih Luas	Gugusan Pulau	Keterangan
Aceh Barat Daya	X	X	Tidak Memenuhi Syarat
Aceh Selatan	X	√	Tidak Memenuhi Syarat
Aceh Singkil	√	√	Memenuhi Syarat
Aceh Tamiang	X	√	Tidak Memenuhi Syarat
Almahera Barat	X	√	Tidak Memenuhi Syarat
Almahera Selatan	√	√	Memenuhi Syarat
Almahera Tengah	√	√	Memenuhi Syarat
Almahera Timur	X	√	Tidak Memenuhi Syarat
Almahera Utara	X	√	Tidak Memenuhi Syarat
Banggai Kepulauan	√	√	Memenuhi Syarat
Banggai Laut	√	√	Memenuhi Syarat
Bangka Tengah	X	√	Tidak Memenuhi Syarat
Banyuwangi	X	√	Tidak Memenuhi Syarat
Belitung Timur	√	√	Memenuhi Syarat
Bengkalis	X	√	Tidak Memenuhi Syarat
Bengkulu Selatan	X	X	Tidak Memenuhi Syarat
Bengkulu Tengah	X	X	Tidak Memenuhi Syarat
Bengkulu Utara	X	√	Tidak Memenuhi Syarat

Digolongkan sebagai daerah kepulauan, setiap kabupaten kota tentunya harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sebagai daerah kepulauan. Indonesia memiliki sebanyak 329 kabupaten kota yang berada di daerah pesisir atau kabupaten kota yang berbatasan secara langsung dengan lautan. Secara geografis, kabupaten kota yang memenuhi syarat sebagai daerah kepulauan ada sebanyak 66 kabupaten kota dan 263 kabupaten kota

lainnya tidak memenuhi syarat sebagai daerah kepulauan. Daerah kabupaten kota yang tergolong bercirikan kepulauan diantaranya adalah 16 daerah yang merupakan administrasi kota dan 50 daerah lainnya merupakan daerah administrasi kabupaten. Kabupaten kota yang memenuhi kriteria tersebut berjumlah 66 kabupaten kota seperti yang terlampir pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Daerah Kabupaten/kota yang Bercirikan Kepulauan

Provinsi	Nama Kab/kota	Luas Daratan (km)	Luas Laut (km)	Jumlah Pulau	Jumlah Gugusan Pulau	Selisih L. laut & L. daratan (km)	Keterangan	Provinsi	Nama Kab/kota	Luas Daratan (km)	Luas Laut (km)	Jumlah Pulau	Jumlah Gugusan Pulau	Selisih L. laut & L. daratan (km)	Keterangan
Aceh	Aceh Singkil	1.852,14	2.710,28	70	1	858,14	kepulauan	NTT	Alor	2.928,47	3.546,12	32	1	617,65	kepulauan
	Kota Sabang	122,13	792,13	5	1	670,00	kepulauan		Flores Timur	1.747,23	2.290,57	16	1	543,34	kepulauan
	Simeulue	1.825,06	3.574,92	185	3	1.749,86	kepulauan		Lembata	1.267,21	2.040,77	5	1	773,56	kepulauan
Bali	Klungkung	313,92	710,44	21	1	396,52	kepulauan		Manggarai Barat	3.135,07	3.314,80	249	1	179,73	kepulauan
Bangka Belitung	Belitung	2.274,00	3.510,41	173	2	1.236,41	kepulauan		Rote Ndao	1285,70	2.318,75	104	1	1.033,05	kepulauan
	Belitung Timur	2.593,67	4.193,71	120	2	1.600,04	kepulauan		Sabu Raijua	460,79	1.370,52	4	1	909,73	kepulauan
Banten	Kota Cilegon	162,43	267,68	7	1	105,25	kepulauan		Sikka	1.674,28	2.443,88	17	1	769,60	kepulauan
	Pandeglan	2.769,71	2.820,16	74	1	50,45	kepulauan	Papua	Biak Numfor	2.229,29	3.898,36	97	2	1.669,07	kepulauan
Jakarta	Jakarta Utara	147,50	170,48	8	1	22,98	kepulauan		Kepulauan Yapen	2.428,22	4.662,19	155	1	2.233,97	kepulauan
	Kepulauan Seribu	10,72	2.483,54	115	1	2.472,82	kepulauan		Suptiori	690,17	2.106,68	124	2	1.416,51	kepulauan
Jawa Tengah	Jerara	1.019,77	2.096,93	32	1	1.077,16	kepulauan	Papua Barat	Kota Sorong	205,45	326,04	22	1	120,59	kepulauan
Jawa Timur	Sumenep	2.086,97	8.408,54	119	7	6.321,57	kepulauan		Raja Ampat	7.442,36	20.481,25	2.955	9	13.038,89	kepulauan
Kalimantan Barat	Kayong Utara	4.160,56	5.236,47	96	4	1.075,91	kepulauan	Sulawesi Selatan	Kepulauan Selayar	1.181,48	8.496,46	102	7	7.314,98	kepulauan
Kalimantan Timur	Kota Bontang	158,63	274,35	25	1	115,72	kepulauan		Kota Makassar	178,15	906,94	14	1	728,79	kepulauan
Kalimantan Utara	Kota Tarakan	250,80	378,32	3	1	127,52	kepulauan		Pangkajene Kepulauan	890,04	10.602,88	191	10	9.712,84	kepulauan
Kepulauan Riau	Bintan	1.320,05	6363,20	317	7	5.043,15	kepulauan		Takalar	555,37	929,00	48	1	373,63	kepulauan
	Karimun	930,33	3.359,31	297	1	2.428,98	kepulauan	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	2.383,13	3.017,94	266	1	634,81	kepulauan
	Kepulauan Anambas	626,71	6344,30	250	3	5.717,59	kepulauan		Banggai Laut	687,76	5.906,04	1.056	2	5.218,28	kepulauan
	Kota Batam	1.034,22	3.109,42	649	1	2075,20	kepulauan	Sulawesi Tenggara	Buton	1.761,85	1.861,93	18	2	100,08	kepulauan
	Kota Tanjung Pinang	146,92	203,00	16	1	56,08	kepulauan		Buton Tengah	852,51	1.079,43	20	2	226,92	kepulauan
	Lingga	2.213,03	8.048,07	1.031	6	5.835,04	kepulauan		Konawe Kepulauan	705,15	869,39	3	1	164,24	kepulauan
	Natuna	2.002,81	8.292,43	183	10	6.289,62	kepulauan		Muna Barat	772,07	1.120,02	43	1	347,95	kepulauan
Maluku	Kepulauan Aru	8.091,36	8.194,96	1.152	1	103,60	kepulauan		Wakatobi	450,19	3.387,36	134	2	2.937,17	kepulauan
Provinsi	Nama Kab/kota	Luas Daratan (km)	Luas Laut (km)	Jumlah Pulau	Jumlah Gugusan Pulau	Selisih L. laut & L. daratan (km)	Keterangan	Provinsi	Nama Kab/kota	Luas Daratan (km)	Luas Laut (km)	Jumlah Pulau	Jumlah Gugusan Pulau	Selisih L. laut & L. daratan (km)	Keterangan
	Kepulauan Tanimbar	4.434,28	7.556,39	536	1	3.122,11	kepulauan	Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe	608,41	4.271,61	83	2	3.663,20	kepulauan
	Kota Tual	235,65	2.652,87	78	4	2.417,22	kepulauan		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	218,42	1.834,27	26	3	1.615,85	kepulauan
	Maluku Barat Daya	4.554,45	10.564,43	70	9	6.009,98	kepulauan		Kepulauan Talaud	1.012,58	3.053,53	25	3	2.040,95	kepulauan
	Maluku Tenggara	1.017,22	3.185,95	59	1	2.168,73	kepulauan		Kota Bitung	329,93	521,84	39	1	191,91	kepulauan
Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	5.979,27	7.395,52	286	4	1.416,25	kepulauan		Kota Manado	162,33	376,21	3	1	213,88	kepulauan
	Kota Padang	693,84	1.021,13	20	1	327,29	kepulauan	Maluku Utara	Minahasa Utara	996,00	1.341,12	39	1	345,12	kepulauan
	Kota Pariaman	102,86	216,56	5	1	113,70	kepulauan		Almohera Selatan	8.084,92	14.463,42	576	3	6.378,50	kepulauan
Sumatera Utara	Nias Barat	582,85	744,61	11	1	161,76	kepulauan		Almohera Tengah	2.275,63	3.704,55	58	4	1.428,92	kepulauan
	Nias Selatan	2.554,04	4.995,29	90	2	2.441,25	kepulauan		Kepulauan Sula	1.781,53	3.356,40	33	1	1.574,87	kepulauan
	Nias Utara	1.297,78	1.628,62	17	1	330,84	kepulauan		Kota Ternate	162,25	1.257,69	11	2	1.095,44	kepulauan

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan sebanyak 66 kabupaten kota yang bercirikan kepulauan. Sebanyak 16 daerah merupakan administrasi kota dan 50 daerah lainnya merupakan administrasi kabupaten. Kota yang bercirikan kepulauan di Indonesia diantaranya Kota Sabang, Kota Cilegon, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Bontang, Kota Tarakan, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kota Tual, Kota Ternate, Kota Sorong, Kota Makassar, Kota Bitung, Kota Manado, Kota Padang dan Kota Pariaman. Kabupaten kota yang bercirikan kepulauan tersebar di 22 provinsi yang ada di Indonesia, diantaranya Provinsi Aceh memiliki 2 kabupaten yang bercirikan kepulauan dan 1 kota yang bercirikan kepulauan, Provinsi Bali memiliki 1 kabupaten yang bercirikan kepulauan, Provinsi Bangka Belitung memiliki 2 kabupaten yang bercirikan kepulauan, Provinsi Banten memiliki 1 kota yang bercirikan kepulauan dan 1 kabupaten yang bercirikan kepulauan, Provinsi DKI Jakarta memiliki 2 wilayah administrasi kota yang bercirikan kepulauan, Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Timur Provinsi Kalimantan Barat memiliki 1 kabupaten yang bercirikan kepulauan, Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara memiliki 1 kota yang bercirikan kepulauan, 2 kota dan 5 kabupatenn yang ada di Provinsi Kepulauan Riau memiliki ciri-ciri sebagai daerah kepulauan, Provinsi Maluku memiliki 4 kabupaten yang bercirikan kepulauan dan 1 kota yang bercirikan kepulauan, Provinsi Maluku Utara memiliki 3 kabupaten yang bercirikan kepulauan dan 1 kota yang bercirikan kepulauan, Sulawesi Tengah memiliki 2 kaupaten yang bercirikan kepulauan, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 7 kabupaten yang bercirikan kepulauan, Provinsi Papua memiliki 3 kabupaten yang bercirikan kepulauan, Provinsi Papua Barat memiliki 1 kabupaten yang bercirikan kepulauan dan 1 kota yang bercirikan kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 3 kabupaten yang bercirikan kepulauan dan 1 kota yang bercirikan kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki 5 kabupaten yang bercirikan kepulauan, Provinsi Sulawesi Utara memiliki 4 kabupaten yang bercirikan kepulauan dan 2 kota yang bercirikan kepulauan, Provinsi Sumatera Barat memiliki 1 kabupaten yang bercirikan kepulauan dan 2 kota yang bercirikan kepulauan, serta Provinsi Sumatera Utara memiliki 3 kabupaten yang bercirikan kepulauan. Provinsi yang memiliki kabupaten/kota yang bercirikan kepulauan terbanyak terdapat di Provinsi Kepulauan Riau, yang mana semua

kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau bercirikan kepulauan. Adapun daerah kabupaten/kota yang bercirikan kepulauan dengan luas daerah laut terluas dimiliki oleh Raja Ampat dengan luas 20.481,25 km<sup>2</sup> dan daerah dengan jumlah pulau terbanyak juga dimiliki oleh Raja Ampat dengan jumlah pulau sebanyak 2.956 pulau, serta perbandingan luas wilayah laut dengan daratan paling besar yaitu selisih 13.084,88 km<sup>2</sup>.

## Kesimpulan

Kabupaten kota yang memiliki pulau di Indonesia berjumlah 255 kabupaten kota. sebanyak 29 daerah diantaranya merupakan administrasi kota dan 226 daerah lainnya merupakan administrasi kabupaten. Sedangkan daerah yang tidak memiliki pulau di Indonesia berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berjumlah 74 kabupaten kota. Diantaranya, 20 daerah merupakan kota dan 54 daerah lainnya merupakan kabupaten. Identifikasi terhadap kabupaten kota yang memiliki daerah laut lebih luas dibandingkan daratannya adalah dengan menentukan batas laut di setiap kabupaten kota. Sesuai dengan UU No 23/2014 menyatakan bahwa setiap kabupaten kota berhak mengklaim wilayah lautnya sejauh 4 mil laut yang diukur dari garis pangkal/garis pantai. Meskipun dapat mengklaim wilayah laut sejauh 4 mil laut, setiap kabupaten kota memiliki luas lautan yang berbeda-beda tergantung dengan kondisi geografisnya. Hasil dari penelitian ini diperoleh dari 329 kabupaten kota yang memiliki laut, sebanyak 72 kabupaten kota yang memiliki lautan lebih luas dibandingkan daratannya. Daerah tersebut terdiri dari 21 merupakan daerah administrasi kota dan 51 daerah lainnya merupakan daerah administrasi kabupaten. Gugusan pulau terbentuk dari kumpulan pulau-pulau yang berada dalam satu lingkup ruang laut yang telah di klaim setiap kabupaten kota. Suatu kumpulan pulau-pulau dapat dikatakan sebagai gugusan pulau jika pulau-pulau tersebut memiliki jarak satu sama lain yang kurang dari 8 mil laut atau kurang dari 2 kali 4 mil laut. Jika beberapa pulau berada diluar 8 mil laut atau pulau-pulau tersebut memiliki jarak yang lebih dari 8 mil laut dari kumpulan pulau yang ada, maka beberapa pulau tersebut dapat dikelompokkan ke dalam gugusan pulau lainnya. Kabupaten kota yang memiliki gugusan pulau di Indonesia berdasarkan hasil penelitian berjumlah 224 kabupaten kota. Diantara 224 kabupaten kota yang memiliki gugusan pulau, sebanyak 25 daerah merupakan administrasi kota dan 199 daerah lainnya merupakan administrasi kabupaten. Sedangkan untuk daerah yang tidak memiliki gugusan pulau adalah sebanyak 105 kabupaten kota, 25 diantaranya daerah administrasi kota dan 80 lainnya merupakan daerah administrasi kabupaten.

## Daftar Pustaka

- Anonim. (2014). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.
- Anonim. (2014). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.
- Anonim. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.
- Ambari, M. (2017). *Kenapa Pembangunan di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Masih Tertinggal?*. <https://www.mongabay.co.id/2017/08/23/kenapa-pembangunan-di-kawasan-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-masih-tertinggal/>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2021
- BIG. (2017). *Jumlah Pulau Indonesia Sebanyak 16.056 Pulau Masih Bisa Bertambah Lagi*. <https://www.big.go.id/news/2017/08/25/jumlah-pulau-indonesia-sebanyak-16-056-pulau-masih-bisa-bertambah-lagi>. Diakses pada tanggal 14 Juni 2021
- BIG. (2017). *Pemanfaatan Potensi Kemaritiman Indonesia Berbasis Informasi Geospasial*. <https://www.big.go.id/content/berita/antara-sejarah-budaya-dan-spasial-dalam-penamaan-rupebumi>. Diakses pada tanggal 14 Juni 2021
- Hidayat, F., & Sutisna, S. (2014). *Uji Geospasial Provinsi Kepulauan Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang No . 23 Tahun 2014 ( Geospatial Test of Archipelagic Province in Indonesia After the Enactment of. 20(2), 135–148*. Badan Informasi Geospasial. Cibinong.
- Saksono, H. (2013). *Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Umum dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP). Jakarta. 1–12.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).